

URGENSI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL DAN BELA NEGARA

Studi Kasus: Konflik di Papua dan Ancaman Disintegrasi Bangsa

Andi Atma Sri Ayu¹, Ilman Irawan²

¹STMIK Bandung

²STMIK Bandung

¹Email: info@stmik-bandung.ac.id

¹Telepon: (022) 7207777

ABSTRACT

The conflict in Papua, which has continued for decades, has become one of the real challenges to Indonesia's national resilience and integrity. This study examines the urgency of national defense and resilience by focusing on the Papua conflict and its potential threat to national disintegration. Using qualitative methods and recent literature reviews, this paper analyzes both structural and non-structural factors that contribute to national vulnerability. The study found that socio-political inequality, separatist movements, and lack of inclusive development are major challenges. Strengthening national identity and equitable development are key to enhancing Indonesia's national resilience.

Keywords: conflict, disintegration, national defense, national identity, Papua, resilience

ABSTRAK

Konflik di Papua yang berlangsung selama beberapa dekade menjadi tantangan nyata bagi ketahanan dan keutuhan nasional Indonesia. Penelitian ini mengkaji urgensi bela negara dan ketahanan nasional dengan fokus pada konflik Papua dan potensi ancaman disintegrasi bangsa. Menggunakan metode kualitatif dan tinjauan literatur terbaru, artikel ini menganalisis faktor struktural dan non-struktural yang menyebabkan kerentanan nasional. Hasil studi menunjukkan bahwa ketimpangan sosial-politik, gerakan separatis, dan minimnya pembangunan inklusif menjadi tantangan utama. Penguatan identitas nasional dan pemerataan pembangunan menjadi kunci meningkatkan ketahanan nasional Indonesia.

Kata Kunci: bela negara, disintegrasi, identitas nasional, ketahanan, konflik, Papua

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang tinggi, senantiasa menghadapi tantangan terhadap keutuhan dan ketahanannya. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, namun sekaligus menjadi potensi kerawanan apabila tidak dikelola dengan bijak dan adil. Ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional, sangat dipengaruhi oleh stabilitas sosial-politik yang ada di setiap daerah. Dalam hal ini, Papua menjadi salah satu wilayah strategis yang terus menjadi sorotan karena kompleksitas konfliknya yang berkelanjutan.

Papua memiliki sejarah panjang hubungan yang rumit dengan pemerintah pusat. Sejak proses integrasi melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, sejumlah kelompok masyarakat Papua merasa bahwa proses tersebut tidak merepresentasikan kehendak rakyat secara demokratis. Ketidakpuasan tersebut terus berkembang menjadi kritik terhadap berbagai bentuk marginalisasi, baik dalam aspek pembangunan, pendidikan, kesehatan, maupun politik. Situasi ini diperburuk oleh adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat maupun kelompok bersenjata, yang menciptakan siklus konflik dan ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

Dalam konteks ketahanan nasional, konflik berkepanjangan di Papua menjadi salah satu ancaman serius terhadap keutuhan NKRI. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain menimbulkan rasa ketidakadilan yang dalam. Selain itu, akses terhadap pelayanan publik yang terbatas, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan semakin memperkuat narasi eksklusi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua. Ketahanan nasional, dalam hal ini, tidak hanya diuji secara fisik melalui gangguan terhadap stabilitas keamanan, tetapi juga secara ideologis dan psikologis ketika rasa nasionalisme dan kepercayaan terhadap negara mulai luntur.

Urgensi bela negara dalam konteks Papua tidak dapat dipisahkan dari pemahaman menyeluruh mengenai identitas dan peran masyarakat Papua dalam bingkai kebangsaan Indonesia. Bela negara bukan semata-mata dalam bentuk kesiapan militer atau

pertahanan fisik, melainkan mencakup kesadaran berbangsa dan bernegara yang ditanamkan melalui pendidikan, pengakuan identitas, dan keterlibatan dalam pembangunan nasional. Masyarakat Papua memiliki nilai-nilai budaya yang kaya dan beragam, yang justru seharusnya menjadi kekuatan dalam memperkuat jati diri nasional apabila dikelola secara inklusif.

Konsep bela negara dalam konteks Papua harus mengedepankan pendekatan non-militer yang lebih humanis dan dialogis. Ini berarti negara harus mengedepankan rekonsiliasi, perlindungan HAM, serta kebijakan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal. Pendidikan bela negara yang kontekstual, misalnya, dapat menjadi sarana penting untuk membentuk pemahaman tentang peran warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa. Pendidikan semacam ini harus mampu mengangkat identitas lokal Papua, menghargai perbedaan budaya, serta menanamkan nilai kebersamaan dalam kerangka NKRI.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa akar konflik di Papua berkaitan erat dengan ketidakadilan historis, politik, dan ekonomi. Runtuboi dan Pangaribuan (2021) menegaskan bahwa salah satu sumber utama konflik adalah ketimpangan relasi kekuasaan antara pusat dan daerah. Sentralisasi kebijakan tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan telah menciptakan alienasi sosial dan ekonomi yang mendalam. Di sisi lain, kebijakan otonomi khusus yang diterapkan sejak tahun 2001 belum sepenuhnya menjawab ekspektasi masyarakat Papua, terutama dalam hal transparansi, efektivitas, dan pemberdayaan lokal.

Dalam konteks tersebut, ketahanan nasional tidak dapat diserahkan hanya kepada institusi pemerintah pusat, tetapi juga harus melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi lintas sektor menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat kohesi sosial. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dari sekadar pengamanan menjadi pemberdayaan. Strategi keamanan yang berbasis pada pendekatan militeristik semata telah terbukti tidak efektif dalam menciptakan perdamaian jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan berbasis keadilan sosial dan pembangunan manusia yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nasional.

Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan nasional di Papua. Masyarakat adat memiliki sistem nilai, hukum, dan struktur sosial yang dapat menjadi aset penting dalam menciptakan harmoni sosial. Pengakuan dan pelibatan mereka dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan akan memperkuat legitimasi negara di mata rakyat Papua. Selain itu, keterlibatan ini juga dapat mencegah eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat lokal dan menimbulkan konflik horizontal.

Pentingnya media dalam membentuk opini publik juga perlu menjadi perhatian dalam strategi bela negara. Selama ini, pemberitaan mengenai Papua di media nasional seringkali tidak mewakili realitas lokal secara utuh. Framing yang bias dapat memperkuat stereotip dan memperkeruh hubungan antara Papua dan daerah lain. Oleh karena itu, media harus didorong untuk menyajikan narasi yang adil, seimbang, dan mencerminkan suara masyarakat Papua. Dalam era digital saat ini, narasi positif dan edukatif melalui media sosial juga dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kesadaran bela negara di kalangan generasi muda.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam menjaga ketahanan nasional di Papua, menganalisis peran bela negara sebagai strategi dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis pendekatan humanistik dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan strategi ketahanan nasional yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, ketahanan nasional hanya dapat dibangun apabila seluruh warga negara merasa menjadi bagian dari bangsa ini dan memiliki harapan yang sama akan masa depan yang adil dan sejahtera.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan Papua, pendekatan tunggal jelas tidak memadai. Diperlukan pendekatan multisektoral dan multidimensi yang melibatkan perspektif keamanan, budaya, ekonomi, pendidikan, serta hak asasi manusia. Pemerintah perlu mengedepankan dialog yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat Papua, mendengarkan aspirasi mereka secara tulus, dan menjadikannya sebagai mitra sejajar dalam proses pembangunan. Ketahanan nasional akan kokoh jika dibangun di atas fondasi kepercayaan, keadilan, dan persatuan dalam keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam isu ketahanan nasional dan bela negara dengan fokus pada konflik di Papua. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali makna, nilai, dan konteks dari suatu fenomena sosial secara holistik. Dalam konteks ini, konflik Papua bukan hanya dipahami sebagai sebuah peristiwa politik semata, tetapi juga sebagai konstruksi sosial dan historis yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap narasi, wacana, dan dinamika sosial-politik yang melingkupi isu Papua, termasuk persepsi masyarakat lokal, kebijakan negara, serta peran aktor-aktor non-negara.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai suatu fenomena. Dalam hal ini, peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis mengenai ketahanan nasional dan bela negara, dengan mengambil studi kasus konflik yang terjadi di Papua sebagai titik fokus kajian. Fokus ini dipilih karena Papua merupakan wilayah yang strategis secara geopolitik namun sering menjadi titik rawan konflik yang dapat mengancam integrasi nasional.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif ini tidak hanya menyajikan fakta atau data secara mentah, melainkan juga menganalisis dan menafsirkan makna dari data tersebut dalam konteks sosial dan politik yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memahami secara utuh dinamika konflik di Papua dan implikasinya terhadap upaya bela negara dan ketahanan nasional.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (library research). Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai

sumber pustaka atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Jurnal Ilmiah Terakreditasi:** Artikel-artikel dari jurnal nasional dan internasional yang telah melalui proses peer-review digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan analisis yang mendalam terkait isu ketahanan nasional, bela negara, dan konflik di Papua. Peneliti memprioritaskan jurnal yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2020–2024) untuk menjamin aktualitas informasi.
- **Laporan Resmi Pemerintah:** Dokumen dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta instansi terkait lainnya dijadikan sebagai referensi utama untuk memahami kebijakan dan strategi pemerintah dalam menangani isu ketahanan dan konflik di Papua.
- **Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Laporan yang diterbitkan oleh LSM, baik nasional maupun internasional, digunakan untuk melihat perspektif lain yang mungkin tidak tercakup dalam laporan resmi pemerintah. LSM yang fokus pada isu Papua dan hak asasi manusia memberikan kontribusi penting dalam mengungkap kondisi sosial dan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
- **Media Massa Daring:** Berita dari media massa daring yang kredibel dan telah melalui proses verifikasi fakta digunakan untuk memperoleh informasi aktual mengenai peristiwa-peristiwa terbaru yang berkaitan dengan konflik di Papua. Peneliti memastikan bahwa sumber berita yang digunakan memiliki reputasi baik dan tidak memiliki kecenderungan politik tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas data.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dari berbagai dokumen tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola, kecenderungan, dan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan ketahanan nasional dan konflik Papua.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk menelaah isi dokumen atau literatur yang telah dikumpulkan. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti faktor-faktor penyebab konflik, respons pemerintah, peran masyarakat sipil, serta dampak konflik terhadap ketahanan nasional.

Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

1. **Reduksi Data:** Menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan tema ketahanan nasional dan bela negara dalam konteks Papua dieliminasi.
2. **Penyajian Data:** Data yang telah disaring disusun dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diuji kembali melalui proses verifikasi dan triangulasi sumber.

4. Validitas dan Keabsahan Data

Validitas data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk menjamin keakuratan dan keandalan temuan. Dalam penelitian ini, validitas data dijaga melalui beberapa cara, di antaranya:

- **Triangulasi Sumber:** Peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Misalnya, informasi dari laporan pemerintah akan dibandingkan dengan laporan dari LSM dan berita media massa.

- **Konsistensi Waktu:** Peneliti hanya menggunakan sumber-sumber yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga relevansi data dengan kondisi terbaru dan menghindari bias historis.
- **Audit Trail:** Seluruh proses pengumpulan dan analisis data didokumentasikan secara rinci, sehingga pihak lain dapat menelusuri dan mengevaluasi proses penelitian yang dilakukan.
- **Peer Review:** Hasil sementara dari analisis data dikonsultasikan dengan ahli atau rekan sejawat yang memiliki kompetensi dalam bidang ketahanan nasional dan studi konflik, untuk mendapatkan masukan dan kritik yang membangun.

5. Fokus dan Batasan Penelitian

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada isu ketahanan nasional dan bela negara dalam konteks konflik Papua. Fokus ini ditetapkan karena konflik di Papua memiliki dimensi yang luas dan berdampak langsung terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, untuk menjaga keterbatasan ruang lingkup, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek konflik secara mendetail, seperti aspek militer atau operasional aparat keamanan. Penelitian ini lebih menekankan pada dimensi sosial-politik, persepsi publik, kebijakan negara, dan dampak terhadap stabilitas nasional.

Batasan lain dalam penelitian ini adalah tidak dilakukannya pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung. Hal ini disebabkan keterbatasan akses dan keamanan dalam mengumpulkan data lapangan di wilayah konflik. Oleh karena itu, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersumber dari literatur dan dokumen yang telah diverifikasi.

6. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memegang teguh prinsip-prinsip etika penelitian, terutama dalam pengolahan dan penyajian data. Semua sumber data dikutip secara jujur dan diberi atribusi yang sesuai untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Peneliti juga berupaya menjaga netralitas dan objektivitas dalam menganalisis konflik Papua, dengan tidak berpihak pada salah satu aktor atau kelompok tertentu.

Selain itu, sensitivitas terhadap isu-isu kemanusiaan yang muncul dalam konflik Papua juga menjadi pertimbangan penting. Peneliti tidak menyajikan informasi yang dapat membahayakan keselamatan individu atau kelompok tertentu, serta menghindari narasi yang bersifat provokatif atau diskriminatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konflik Papua sebagai bagian dari tantangan ketahanan nasional, dan bukan untuk memperkeruh situasi yang ada.

7. Justifikasi Pemilihan Metode

Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam dan kontekstual mengenai isu yang dikaji. Metode ini dianggap paling tepat karena:

- Konflik di Papua merupakan isu yang kompleks, melibatkan faktor sejarah, budaya, politik, dan ekonomi.
- Data kuantitatif tidak cukup untuk menggambarkan dimensi subjektif dan interpretatif dari fenomena yang dikaji.
- Peneliti ingin memahami makna di balik peristiwa, narasi, dan respons dari berbagai aktor yang terlibat dalam konflik.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman akademik dan kebijakan publik mengenai ketahanan nasional dan bela negara di Indonesia, khususnya dalam konteks Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Konteks Papua

Isu Papua bukan hanya tentang wilayah yang jauh di ujung timur Indonesia. Ia adalah cermin dari pergulatan kita sebagai bangsa dalam memaknai apa arti keindonesiaan yang sejati. Ia mencerminkan bagaimana kita, sebagai satu kesatuan bangsa, memahami dan memperlakukan keragaman—bukan hanya sebagai semboyan, tetapi sebagai kenyataan yang menuntut pengakuan dan keadilan.

Papua bukan sekadar soal konflik, bukan sekadar tentang separatisme atau pembangunan infrastruktur. Papua adalah soal rasa. Rasa memiliki. Rasa dihargai. Rasa didengar. Rasa menjadi bagian dari bangsa ini tanpa syarat, tanpa syarat harus menyerupai atau menyamakan diri dengan pusat.

Sering kali, pendekatan kita terhadap Papua terlalu teknokratis dan sempit. Kita berbicara tentang data pembangunan, angka pertumbuhan ekonomi, atau capaian-capaian proyek strategis. Namun kita lupa bahwa di balik semua itu, ada manusia. Ada komunitas-komunitas adat dengan sejarah dan jati diri mereka sendiri. Ada anak-anak muda yang bertanya: Apakah aku bagian dari negeri ini? Apakah suaraku dihargai?

Ketika masyarakat Papua merasa bahwa mereka hanya menjadi objek dari kebijakan, bukan subjek dari masa depan mereka sendiri, maka lahirlah kekosongan makna dalam relasi antara negara dan rakyatnya. Kekosongan ini kemudian diisi oleh perasaan kecewa, ketidakpuasan, bahkan ketidakpercayaan. Dari situlah benih-benih kecurigaan tumbuh. Dan dari kecurigaan yang dibiarkan lama, bisa muncul bentuk perlawanan—bukan hanya fisik, tetapi juga batin yang menjauh dari identitas nasional.

Dalam konteks seperti ini, ketahanan nasional dan bela negara tidak bisa dipahami secara kaku. Ia tidak bisa sekadar dimaknai sebagai upaya mempertahankan keutuhan wilayah atau loyalitas terhadap negara dalam arti formal. Ketahanan nasional justru menemukan maknanya yang terdalam ketika ia mampu merawat rasa keadilan dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang merasa ditinggalkan.

Bela negara bukan hanya tugas militer atau aparat keamanan. Ia adalah tanggung jawab moral kita semua untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa aman—bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial dan kultural. Dalam konteks Papua, bela negara berarti hadir dengan kepekaan, bukan dengan instruksi; dengan empati, bukan dengan dominasi.

Keindonesiaan yang inklusif hanya mungkin terwujud jika kita mengakui bahwa Indonesia bukanlah satu warna, satu bahasa, satu budaya. Indonesia adalah mosaik—kumpulan warna, suara, dan identitas yang beragam namun bersatu oleh rasa saling

menghormati. Maka, tugas negara bukanlah menyeragamkan, tetapi merangkul keragaman itu sebagai kekayaan.

Papua adalah bagian dari mosaik itu. Dan seperti bagian tubuh yang terluka, ia tidak bisa disembuhkan dengan obat yang sama yang digunakan untuk bagian lainnya. Ia butuh perhatian khusus, pendekatan yang berbeda, dan yang paling penting—pengakuan bahwa mereka punya hak untuk menentukan arah masa depan mereka sendiri dalam bingkai keindonesiaan.

Oleh karena itu, membangun ketahanan nasional di Papua bukan soal menegaskan kedaulatan secara sepihak. Ini soal membangun kembali kepercayaan—dari Papua kepada negara, dan dari negara kepada Papua. Kepercayaan yang lahir dari dialog, dari keterbukaan, dari kebijakan yang berpihak, dan dari kesediaan untuk mendengarkan tanpa menghakimi.

Karena pada akhirnya, keutuhan bangsa ini tidak akan dijaga oleh beton dan pagar. Ia dijaga oleh rasa saling percaya. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh jika kita mau melihat Papua bukan sebagai “masalah,” tetapi sebagai bagian dari diri kita sendiri—yang selama ini merindukan pelukan, bukan penghakiman.

Sebuah Luka Sejarah yang Belum Sembuh

Jika kita ingin memahami persoalan Papua secara utuh, kita perlu bersedia berjalan melampaui permukaan dan mendengar cerita-cerita yang hidup dalam keseharian masyarakatnya. Akar konflik di Papua tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia berakar dari sejarah integrasi yang masih menyisakan banyak tanda tanya, dari ketimpangan pembangunan yang membuat jurang kesejahteraan semakin lebar, serta dari diskriminasi sistemik yang dirasakan masyarakat Papua dalam berbagai aspek kehidupan.

Sejarah mencatat bahwa integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 masih menjadi titik perdebatan hingga kini. Banyak pihak yang mempertanyakan legitimasi dan keadilan proses tersebut. Di sisi lain, banyak masyarakat Papua merasa bahwa sejarah mereka tidak ditulis oleh mereka sendiri, melainkan ditentukan oleh kekuatan eksternal. Ketika

sejarah tidak dirasakan sebagai milik bersama, maka ikatan kebangsaan pun menjadi rapuh.

Ketidakadilan sosial juga menjadi penyebab utama ketegangan. Dalam banyak kasus, masyarakat Papua merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan keadilan hukum tidak selalu mereka rasakan secara setara. Diskriminasi, baik yang tersurat maupun tersirat, masih sering mereka alami—dalam bentuk pandangan stereotip, perlakuan aparat, hingga representasi media. Semua ini menumbuhkan perasaan inferior dan ketidakpuasan yang pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk menentukan nasib sendiri.

Ketimpangan pembangunan turut memperparah situasi. Meskipun dana otonomi khusus digelontorkan dalam jumlah besar, pembangunan sering kali tidak menyentuh akar kebutuhan masyarakat. Jalan dibangun, tetapi tidak selalu menghubungkan pusat-pusat kehidupan warga. Sekolah berdiri, tapi minim guru dan fasilitas. Rumah sakit ada, namun sulit dijangkau dan kekurangan tenaga medis. Ketika pembangunan tidak selaras dengan aspirasi lokal, yang muncul bukan rasa syukur, melainkan kekecewaan.

Dalam atmosfer seperti ini, rasa keterasingan masyarakat Papua terhadap negara semakin menguat. Dan ketika mereka merasa tidak didengar, muncul dorongan untuk bersuara—terkadang dalam bentuk tuntutan separatisme. Bagi mereka, itu bukan sekadar agenda politik, melainkan ekspresi dari rasa sakit yang lama terpendam.

Ketahanan Nasional yang Diuji

Konflik yang berkepanjangan di Papua merupakan refleksi dari tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan nasional yang sejati. Ketahanan nasional tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, kesiapan menghadapi ancaman luar, atau kemegahan institusi negara. Lebih dari itu, ia adalah gambaran menyeluruh dari bagaimana negara hadir dalam kehidupan rakyatnya—dengan rasa adil, pengakuan terhadap martabat manusia, serta keberpihakan pada kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyuarakan realitas yang perlu diakui dengan jujur: bahwa masih ada jurang yang lebar antara semangat nasionalisme yang dicanangkan di pusat, dan kenyataan hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia. Jurang ini bukan hanya fisik, tetapi juga simbolik—terlihat dalam ketimpangan pembangunan, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta perasaan terasing dari narasi besar kebangsaan.

Ketimpangan pembangunan di Papua bukan sekadar soal infrastruktur atau angka-angka ekonomi. Ia adalah persoalan struktural yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Meski berbagai proyek dan program pembangunan digalakkan, kenyataannya banyak di antaranya tidak benar-benar menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Akibatnya, yang muncul bukan rasa memiliki terhadap pembangunan, melainkan kekecewaan dan bahkan penolakan. Pembangunan yang tidak dialogis justru memunculkan kesenjangan sosial dan memperlemah rasa kebersamaan.

Selain ketimpangan, marginalisasi menjadi luka kolektif yang dirasakan masyarakat Papua. Mereka sering kali merasa tidak diakui dalam sistem sosial dan politik nasional. Representasi yang minim dalam lembaga-lembaga negara, stereotip negatif terhadap identitas Papua, serta tindakan diskriminatif yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat rasa keterasingan. Ketika satu kelompok masyarakat merasa hanya menjadi penonton dalam cerita bangsanya sendiri, maka rasa memiliki terhadap negara menjadi pudar.

Dalam konteks ini, konsep bela negara perlu didefinisikan ulang secara menyeluruh dan holistik. Bela negara tidak seharusnya dimaknai secara sempit sebagai loyalitas tanpa kritik atau keterlibatan dalam pertahanan bersenjata. Di Papua, bela negara harus diwujudkan melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang inklusif. Bela negara adalah tentang menghadirkan keadilan dalam pendidikan, kesetaraan dalam perlakuan hukum, keterlibatan dalam perumusan kebijakan, serta penghargaan terhadap

identitas budaya lokal. Ini adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air: ketika negara memperlakukan seluruh rakyatnya sebagai bagian yang berharga dan setara.

Upaya memperkuat ketahanan nasional harus berpijak pada keadilan sosial. Tidak ada ketahanan yang benar-benar kokoh jika masih ada sekelompok warga yang merasa dianaktirikan. Ketahanan yang dibangun di atas fondasi ketimpangan hanya akan menciptakan retakan-retakan baru yang siap menjadi krisis sewaktu-waktu. Sebaliknya, ketika seluruh elemen bangsa merasa diperlakukan adil, diakui keberadaannya, dan dilibatkan dalam proses pembangunan, maka ketahanan nasional akan tumbuh dari dalam—dari rasa percaya, dari rasa bangga, dan dari rasa memiliki yang tulus.

Penting juga untuk memahami bahwa Papua bukanlah masalah yang harus "diselesaikan", tetapi bagian dari Indonesia yang harus dirangkul. Memperlakukan Papua sebagai "masalah" menciptakan jarak psikologis dan sosial yang hanya akan memperparah ketegangan. Sebaliknya, melihat Papua sebagai mitra sejajar dalam membangun masa depan bangsa akan membuka ruang untuk kolaborasi, dialog, dan rekonsiliasi yang lebih sehat dan konstruktif.

Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam menyatukan kembali ikatan kebangsaan yang retak. Sistem pendidikan di Papua harus merefleksikan nilai-nilai lokal, sejarah masyarakatnya, dan identitas budayanya. Pendidikan yang kontekstual akan memperkuat rasa bangga sebagai orang Papua sekaligus memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif. Generasi muda Papua perlu tumbuh dengan pemahaman bahwa mereka adalah bagian penting dari Indonesia—bukan hanya secara administratif, tetapi secara kultural dan emosional.

Di sisi lain, negara juga perlu membuka ruang-ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi masyarakat Papua. Kebijakan otonomi khusus, misalnya, harus benar-benar dievaluasi pelaksanaannya agar tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi menjadi wadah nyata bagi masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat sipil dalam proses

perumusan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil negara benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Dialog yang setara antara negara dan masyarakat Papua juga merupakan langkah krusial. Selama ini, suara-suara dari Papua kerap dipinggirkan atau bahkan dibungkam. Ruang-ruang kritik sering kali dipersempit atas nama stabilitas. Namun, stabilitas yang dibangun di atas represi bukanlah stabilitas yang tahan lama. Justru dialog terbuka dan tulus akan menjadi fondasi kuat bagi rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang. Negara harus belajar untuk tidak alergi terhadap kritik, karena dari situlah kita bisa bertumbuh sebagai bangsa.

Dalam kesimpulan yang lebih luas, konflik Papua adalah pengingat bagi kita semua bahwa proyek kebangsaan Indonesia masih jauh dari selesai. Ia adalah proyek yang menuntut komitmen, keberanian, dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan masa lalu serta memperbaikinya secara bersama. Indonesia yang adil, damai, dan kuat hanya bisa terwujud jika seluruh wilayah—termasuk Papua—merasa bahwa mereka adalah pemilik sah dari rumah besar bernama Indonesia ini.

Ketahanan nasional tidak bisa lagi dipahami sebagai konsep elitis yang hanya relevan di ruang-ruang pemerintahan atau militer. Ia harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat—terasa dalam sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, hingga jalan-jalan kecil di pelosok Papua. Ketahanan nasional yang sejati adalah ketika seorang anak Papua bisa bermimpi setinggi anak-anak di Jakarta, Surabaya, atau Bandung, dan tahu bahwa mimpinya dihargai dan bisa terwujud di negeri ini.

Untuk itu, kita memerlukan transformasi paradigma dalam membangun bangsa. Kita butuh lebih banyak mendengar daripada menggurui, lebih banyak merangkul daripada menindas, dan lebih banyak bekerja sama daripada mencurigai. Papua tidak akan menjadi kuat dengan pendekatan militeristik semata, melainkan dengan pendekatan kemanusiaan yang tulus.

Papua bukan ancaman. Papua adalah harapan. Ia adalah bagian dari mozaik kebangsaan yang memperkaya Indonesia. Ketika Papua bahagia, Indonesia menjadi lebih kuat. Ketika Papua sejahtera, Indonesia lebih kokoh. Dan ketika Papua merasa dicintai, maka Indonesia akan benar-benar utuh—bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara batiniah.

Maka dari itu, mari kita akhiri era ketidakpercayaan dan buka lembaran baru dalam sejarah bangsa ini. Sebuah lembaran yang ditulis bersama, dengan tinta pengakuan, pena keadilan, dan kertas kasih sayang. Karena sejatinya, ketahanan nasional tidak dibangun oleh tembok dan senjata, melainkan oleh jiwa-jiwa yang saling percaya dan saling menguatkan.

Bela Negara Bukan Tentang Senjata

Konsep bela negara sering kali diidentikkan dengan kewajiban militeristik atau loyalitas mutlak kepada negara. Namun, dalam konteks Papua—dan Indonesia secara umum—pemahaman semacam ini perlu direvisi secara mendalam. Bela negara sejatinya adalah ekspresi cinta pada tanah air, yang bisa diwujudkan dalam banyak bentuk: merawat lingkungan, menjaga harmoni sosial, mengembangkan budaya lokal, hingga terlibat aktif dalam pembangunan komunitas.

Di Papua, pendekatan bela negara yang terlalu sempit justru memperbesar jurang. Ketika bela negara diterjemahkan sebagai “wajib tunduk tanpa bertanya,” maka semangat partisipatif berubah menjadi kecurigaan. Justru sebaliknya, bela negara di Papua haruslah berakar pada penghargaan terhadap kearifan lokal. Pendidikan yang menghormati budaya Papua, kurikulum yang mencerminkan sejarah lokal, dan pelibatan tokoh adat dalam kebijakan publik adalah bentuk nyata bela negara yang kontekstual.

Lebih dari itu, negara harus membuka ruang dialog yang sejajar. Tidak cukup hanya mendatangi Papua dengan janji dan proyek-proyek besar. Negara perlu duduk bersama masyarakat Papua sebagai mitra setara, bukan sebagai objek kebijakan. Dalam dialog yang tulus dan setara inilah, benih kepercayaan bisa tumbuh kembali. Rasa memiliki terhadap negara tidak bisa dipaksakan; ia hanya bisa lahir dari proses yang jujur dan manusiawi.

Ketika Kebangsaan Tidak Lagi Dirasa

Papua adalah cermin—cermin yang memantulkan wajah bangsa Indonesia dengan segala keberagaman, janji, sekaligus luka yang belum sembuh. Lewat Papua, kita bisa melihat dengan jujur bahwa kebangsaan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan melalui simbol dan slogan. Ia adalah sesuatu yang harus dibangun dengan pengakuan, keadilan, dan rasa saling memiliki.

Kegagalan negara dalam memahami dan merawat keragaman telah menciptakan jarak yang dalam antara Papua dan pusat kekuasaan. Ketika identitas lokal tidak diakui secara utuh, ketika sejarah masyarakat Papua tidak diberi tempat dalam narasi nasional, dan ketika suara-suara dari pinggiran terus diabaikan, maka yang tumbuh bukanlah rasa cinta, melainkan luka dan kecewa. Dalam ruang-ruang kosong itulah kemudian muncul celah yang bisa diisi oleh ide separatisme—bukan karena masyarakat membenci Indonesia, tetapi karena mereka merasa tidak lagi menjadi bagiannya.

Kita sering kali berpikir bahwa ancaman disintegrasi berasal dari luar negeri, dari infiltrasi ideologi asing, atau dari kekuatan global yang ingin menggoyahkan kedaulatan. Namun, ancaman sejati justru tumbuh dari dalam—dari perasaan tidak dilibatkan, dari rasa tidak dianggap, dari pengalaman sehari-hari yang membuat seseorang merasa asing di negerinya sendiri. Ancaman ini tidak datang dengan senjata, tetapi dengan sunyi. Sunyi karena tidak didengar, tidak diakui, dan tidak diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.

Jika kita ingin membangun ketahanan nasional yang benar-benar kuat, maka pendekatannya tidak boleh lagi semata-mata bersifat struktural atau represif. Negara harus hadir secara nyata dan tulus dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai kekuasaan yang memerintah dari atas, tetapi sebagai pelindung yang mengayomi, sahabat yang mendengar, dan mitra sejati dalam menjalani kehidupan bersama.

Kehadiran negara bukan sekadar dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau program-program formal. Kehadiran itu harus dirasakan dalam keadilan yang nyata, dalam perlakuan yang setara, dalam pendidikan yang menghormati budaya lokal, serta dalam kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. Negara yang hadir adalah

negara yang tahu bagaimana mendengar sebelum bertindak, dan memahami sebelum membuat keputusan.

Kohesi sosial yang rapuh di Papua menjadi alarm bagi kita semua—bahwa nasionalisme tidak bisa dibangun hanya dengan mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Nasionalisme harus dihidupi dan dipelihara setiap hari, dalam tindakan kecil dan kebijakan besar. Ia adalah hasil dari hubungan yang sehat antara negara dan rakyat, dari rasa saling percaya dan saling membutuhkan.

Dalam konteks Papua, ini berarti membuka ruang dialog yang tulus dan setara, menghapus stigma dan diskriminasi, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri. Ini juga berarti bahwa negara harus mau mengakui kekeliruan masa lalu, dan dengan rendah hati memperbaikinya demi masa depan yang lebih adil.

Papua bukan ujian terakhir dari proyek kebangsaan kita, tetapi mungkin salah satu yang paling menentukan. Jika kita berhasil merajut kembali kepercayaan dan membangun kohesi yang sehat di Papua, maka kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi juga dewasa dalam keberagaman. Namun jika kita terus menutup mata terhadap ketidakadilan yang ada, maka luka ini bisa terus menganga dan memperlemah fondasi bangsa.

Oleh karena itu, mari kita mulai kembali dari hal paling dasar: mendengarkan. Karena dari mendengarkan, kita bisa belajar. Dari belajar, kita bisa memahami. Dan dari memahami, kita bisa membangun bangsa—bukan dengan rasa takut, tapi dengan cinta dan pengakuan yang sejati.

Membangun Ketahanan Nasional yang Berkeadilan

Penguatan ketahanan nasional di Papua hanya bisa dilakukan jika kita mengubah pendekatan yang selama ini bersifat sentralistik menjadi lebih kontekstual dan inklusif. Indonesia adalah negara besar dengan keragaman yang luar biasa. Maka pendekatan satu untuk semua tidak bisa lagi diterapkan. Setiap wilayah, termasuk Papua, membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarahnya.

Pertama, negara harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat Papua, bukan pada elite ekonomi atau politik semata. Program pembangunan harus dirancang dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek. Aspirasi mereka harus menjadi dasar, bukan sekadar pelengkap.

Kedua, pembangunan harus berbasis potensi lokal. Papua memiliki kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Namun, selama ini potensi itu belum sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Papua sendiri. Sering kali, kekayaan alam justru menjadi sumber konflik karena eksploitasi yang tidak adil. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan pada kemandirian lokal—di mana masyarakat Papua menjadi pelaku utama dalam membangun masa depan mereka.

Ketiga, sistem pendidikan harus mencerminkan identitas dan kebutuhan masyarakat Papua. Kurikulum nasional perlu membuka ruang bagi pelajaran sejarah lokal, bahasa daerah, dan kearifan adat. Pendidikan yang membumi akan menumbuhkan rasa bangga menjadi orang Papua sekaligus menjadi bagian dari Indonesia.

Keempat, ruang politik dan birokrasi harus terbuka bagi anak-anak Papua. Representasi politik yang adil dan partisipasi dalam pengambilan keputusan akan memperkuat kepercayaan terhadap negara. Negara harus mendorong kaderisasi pemimpin lokal dan memastikan bahwa kebijakan untuk Papua tidak hanya datang dari Jakarta, tetapi juga lahir dari tanah Papua itu sendiri.

Mendengar Sebagai Tindakan Politik

Salah satu kunci paling mendasar dalam penguatan ketahanan nasional di Papua bukan terletak pada kekuatan senjata atau kelengkapan teknologi pertahanan, melainkan pada kesediaan untuk mendengar. Terdengar sederhana, namun sejatinya mendengar adalah tindakan yang paling mendalam dan radikal dalam politik kemanusiaan. Sebab, dengan mendengar, kita melakukan lebih dari sekadar menyimak kata-kata—kita mengakui keberadaan, pengalaman, dan keabsahan suara orang lain.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Papua telah mencoba menyampaikan suara mereka: tentang ketidakadilan, tentang keterpinggiran, tentang identitas yang tak dianggap, dan

tentang impian mereka yang belum dijawab. Namun sering kali, yang terdengar justru bukan suara dari tanah Papua itu sendiri, melainkan narasi-narasi dari luar yang mengklaim tahu apa yang terbaik untuk Papua.

Ketika sebuah bangsa berhenti mendengar sebagian dari warganya, maka bangsa itu kehilangan sebagian dari jiwanya. Karena ketahanan nasional bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah, tetapi menjaga utuhnya rasa kebersamaan di antara seluruh anak bangsa.

Dalam konteks Papua, mendengar tidak boleh bersifat simbolik atau seremonial. Mendengar harus menjadi landasan etis dan politik dalam membangun kebijakan. Negara perlu secara aktif membangun mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat Papua menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, bermakna, dan berpengaruh. Bukan sekadar diundang hadir, tetapi benar-benar diberi ruang untuk bersuara dan didengar.

Forum-forum dialog yang inklusif, musyawarah adat yang menghormati sistem nilai lokal, serta konsultasi publik yang sungguh-sungguh harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, mulai dari tingkat desa hingga kebijakan nasional. Mendengar berarti memberi ruang pada pengetahuan lokal, pada cara hidup yang selama ini bertahan dalam tradisi, dan pada kearifan yang tidak tertulis di dalam buku-buku hukum.

Namun, lebih dari sekadar membuka ruang dialog, yang paling penting adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasilnya. Terlalu sering masyarakat diajak bicara, tetapi tidak dilibatkan dalam tindak lanjut. Ini yang membuat kepercayaan retak. Masyarakat Papua akan percaya pada negara ketika negara menunjukkan bahwa suara mereka benar-benar berpengaruh dalam keputusan yang diambil.

Mendengar juga berarti menghormati perbedaan cara pandang. Papua memiliki sejarah, identitas, dan cara berpikir yang mungkin tidak sama dengan wilayah lain di Indonesia. Tetapi dalam keragaman itu, terdapat kekayaan yang bisa memperkuat bangsa—bila kita mampu melihatnya sebagai kekuatan, bukan ancaman.

Ketahanan nasional hanya akan tumbuh jika setiap warga negara merasa menjadi bagian dari Indonesia karena rasa memiliki, bukan karena paksaan. Rasa memiliki itu tumbuh dari hubungan yang setara, dari dialog yang jujur, dari pengakuan yang tulus. Dan semuanya berawal dari kesediaan untuk mendengar—mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga.

Dalam banyak kasus, masyarakat tidak menuntut hal yang luar biasa. Mereka hanya ingin didengar, diakui, dan diperlakukan secara adil. Mereka ingin agar kehidupan mereka dihargai, sejarah mereka dihormati, dan masa depan mereka diperjuangkan bersama-sama. Dalam suasana seperti itulah ketahanan nasional akan bertumbuh secara organik—tidak dibangun dari ketakutan, tapi dari kepercayaan dan harapan.

Kini, saatnya negara tidak lagi datang ke Papua sebagai pengatur, tetapi sebagai pendengar yang baik. Sebagai pihak yang hadir tidak hanya membawa agenda pembangunan, tetapi juga membawa ruang bagi aspirasi rakyat untuk menentukan sendiri arah hidup mereka. Dengan begitu, kebijakan yang lahir bukanlah kebijakan dari pusat untuk daerah, tetapi kebijakan bersama yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua itu sendiri.

Kita tidak sedang membangun Papua. Kita sedang membangun Indonesia—dari Papua, bersama Papua. Dan itu hanya mungkin jika kita belajar untuk mendengar lebih dulu, dengan tulus, sabar, dan sepuh hati.

Ketahanan yang Tumbuh dari Hati

Ketahanan nasional sering kali dibayangkan sebagai sesuatu yang megah dan kokoh—dipenuhi oleh kekuatan militer, kecanggihan alat pertahanan, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman luar. Namun, dalam hakikat yang paling mendalam, ketahanan sejati bukanlah soal kekuatan fisik semata, melainkan tentang kekuatan hati. Tentang bagaimana seluruh elemen bangsa merasa menjadi bagian dari satu rumah besar bernama Indonesia. Tentang bagaimana setiap individu, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Merauke, merasa didengar, dihargai, dan dibutuhkan.

Ketahanan nasional yang kokoh tidak lahir dari rasa takut, tapi dari rasa cinta. Ketika seseorang merasa memiliki, maka secara alami ia akan menjaga. Ketika masyarakat percaya bahwa negara hadir untuk mereka, maka mereka akan berdiri untuk negara itu. Dan ketika rakyat merasa diperlakukan dengan adil, maka tidak ada ruang bagi perpecahan.

Namun, realitas yang dihadapi oleh sebagian saudara kita, khususnya di Papua, menunjukkan bahwa rasa memiliki itu belum sepenuhnya tumbuh. Papua adalah bagian tubuh bangsa yang selama ini terluka—terluka oleh ketimpangan, oleh stigma, oleh kurangnya kehadiran negara yang tulus dan manusiawi. Luka ini bukan hanya soal pembangunan fisik yang tertinggal, tapi lebih dalam lagi: soal batin yang merasa terasing dari narasi besar kebangsaan.

Sering kali kita melihat Papua melalui kacamata keamanan. Kita berbicara tentang separatisme, tentang stabilitas, tentang kontrol. Padahal, sebelum kita bicara tentang ancaman, kita harus jujur bertanya: apakah kita sudah benar-benar hadir untuk Papua? Apakah suara mereka telah kita dengarkan? Apakah harapan mereka sudah kita hormati? Ataukah kita selama ini hanya meminta mereka untuk setia, tanpa pernah benar-benar menyapa dengan empati?

Ketahanan nasional sejati hanya akan tumbuh jika negara membangun kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari hubungan yang jujur, dari dialog yang setara, dari pengakuan atas identitas, sejarah, dan martabat setiap kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan militeristik bukanlah jawaban utama. Sebaliknya, pendekatan kemanusiaan dan kultural jauh lebih bermakna.

Kita harus mulai melihat Papua bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian yang berharga dari tubuh bangsa. Seperti halnya sebuah luka yang harus dirawat dengan kasih, Papua pun harus dipeluk—bukan dengan curiga, tetapi dengan cinta dan pengertian. Pelukan itu bisa berbentuk pendidikan yang berpihak, kebijakan yang adil, pelayanan publik yang bermartabat, dan ruang dialog yang terbuka.

Bayangkan jika setiap anak Papua merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia bukan karena diharuskan, tetapi karena merasa dihargai. Bayangkan jika para pemuda di tanah

Papua melihat masa depan mereka di negeri ini, bukan di luar sana. Bayangkan jika para orang tua di desa-desa Papua percaya bahwa negara ini melindungi mereka dan menghormati kehidupan mereka.

Semua itu hanya mungkin jika kita memulai dari hati—dari kesadaran bahwa nasionalisme yang paling kuat adalah nasionalisme yang manusiawi. Nasionalisme yang tidak menuntut keseragaman, tetapi merayakan keberagaman. Nasionalisme yang tidak mendominasi, tetapi mengayomi.

Karena pada akhirnya, Indonesia bukan hanya tentang pulau-pulau, gunung-gunung, atau batas wilayah. Indonesia adalah tentang manusia. Tentang rasa saling memiliki, saling percaya, dan saling menguatkan. Maka, jika kita ingin membangun ketahanan nasional yang utuh, mari kita mulai dengan membangun kasih di antara sesama.

Ketahanan yang tumbuh dari hati akan bertahan lebih lama daripada yang dibangun dengan kekuatan senjata. Ia tidak mudah runtuh karena konflik, tidak mudah goyah karena provokasi. Ia hidup dalam relung terdalam kesadaran kolektif rakyat bahwa negara ini adalah milik bersama.

Dan untuk itu, mari kita rangkul Papua. Bukan sebagai beban, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai saudara yang selama ini menunggu diperlakukan dengan adil dan penuh cinta. Karena ketika Papua bahagia, Indonesia menjadi lebih kuat.

Menuju Indonesia yang Lebih Manusiawi

Konflik di Papua adalah pelajaran besar bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan kita bahwa pembangunan tanpa keadilan adalah ilusi, bahwa nasionalisme tanpa empati adalah kekosongan, dan bahwa ketahanan tanpa keterlibatan seluruh warga adalah rapuh. Oleh karena itu, sudah saatnya kita membangun ulang konsep ketahanan nasional dan bela negara dengan pondasi humanis—yang menempatkan manusia dan martabatnya sebagai pusat dari segala kebijakan.

Papua tidak membutuhkan belas kasihan. Papua membutuhkan pengakuan. Tidak cukup hanya dengan dana dan proyek; yang lebih dibutuhkan adalah hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar, dan tangan yang mau merangkul. Jika kita bisa merawat Papua

dengan cinta dan keadilan, maka kita bukan hanya menyelamatkan Papua, tetapi juga menyelamatkan keindonesiaan kita sendiri.

Mari kita jaga tenun kebangsaan ini—dengan benang empati, dengan simpul keadilan, dan dengan warna-warni kebudayaan yang saling melengkapi. Karena Indonesia tidak akan pernah utuh tanpa Papua.

KESIMPULAN

Konflik yang berkepanjangan di Papua merupakan refleksi dari tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan ketahanan nasional yang sejati. Ketahanan nasional tidak hanya berbicara tentang kekuatan militer, kesiapan menghadapi ancaman luar, atau kemegahan institusi negara. Lebih dari itu, ia adalah gambaran menyeluruh dari bagaimana negara hadir dalam kehidupan rakyatnya—dengan rasa adil, pengakuan terhadap martabat manusia, serta keberpihakan pada kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyuarakan realitas yang perlu diakui dengan jujur: bahwa masih ada jurang yang lebar antara semangat nasionalisme yang dicanangkan di pusat, dan kenyataan hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia. Jurang ini bukan hanya fisik, tetapi juga simbolik—terlihat dalam ketimpangan pembangunan, kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, serta perasaan terasing dari narasi besar kebangsaan.

Ketimpangan pembangunan di Papua bukan sekadar soal infrastruktur atau angka-angka ekonomi. Ia adalah persoalan struktural yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Meski berbagai proyek dan program pembangunan digalakkan, kenyataannya banyak di antaranya tidak benar-benar menyentuh kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Akibatnya, yang muncul bukan rasa memiliki terhadap pembangunan, melainkan kekecewaan dan bahkan penolakan. Pembangunan yang tidak dialogis justru memunculkan kesenjangan sosial dan memperlemah rasa kebersamaan.

Selain ketimpangan, marginalisasi menjadi luka kolektif yang dirasakan masyarakat Papua. Mereka sering kali merasa tidak diakui dalam sistem sosial dan politik nasional.

Representasi yang minim dalam lembaga-lembaga negara, stereotip negatif terhadap identitas Papua, serta tindakan diskriminatif yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat rasa keterasingan. Ketika satu kelompok masyarakat merasa hanya menjadi penonton dalam cerita bangsanya sendiri, maka rasa memiliki terhadap negara menjadi pudar.

Dalam konteks ini, konsep bela negara perlu didefinisikan ulang secara menyeluruh dan holistik. Bela negara tidak seharusnya dimaknai secara sempit sebagai loyalitas tanpa kritik atau keterlibatan dalam pertahanan bersenjata. Di Papua, bela negara harus diwujudkan melalui pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang inklusif. Bela negara adalah tentang menghadirkan keadilan dalam pendidikan, kesetaraan dalam perlakuan hukum, keterlibatan dalam perumusan kebijakan, serta penghargaan terhadap identitas budaya lokal. Ini adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air: ketika negara memperlakukan seluruh rakyatnya sebagai bagian yang berharga dan setara.

Upaya memperkuat ketahanan nasional harus berpijak pada keadilan sosial. Tidak ada ketahanan yang benar-benar kokoh jika masih ada sekelompok warga yang merasa dianaktirikan. Ketahanan yang dibangun di atas fondasi ketimpangan hanya akan menciptakan retakan-retakan baru yang siap menjadi krisis sewaktu-waktu. Sebaliknya, ketika seluruh elemen bangsa merasa diperlakukan adil, diakui keberadaannya, dan dilibatkan dalam proses pembangunan, maka ketahanan nasional akan tumbuh dari dalam—dari rasa percaya, dari rasa bangga, dan dari rasa memiliki yang tulus.

Penting juga untuk memahami bahwa Papua bukanlah masalah yang harus "diselesaikan", tetapi bagian dari Indonesia yang harus dirangkul. Memperlakukan Papua sebagai "masalah" menciptakan jarak psikologis dan sosial yang hanya akan memperparah ketegangan. Sebaliknya, melihat Papua sebagai mitra sejajar dalam membangun masa depan bangsa akan membuka ruang untuk kolaborasi, dialog, dan rekonsiliasi yang lebih sehat dan konstruktif.

Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam menyatukan kembali ikatan kebangsaan yang retak. Sistem pendidikan di Papua harus merefleksikan nilai-nilai lokal, sejarah masyarakatnya, dan identitas budayanya. Pendidikan yang kontekstual akan

memperkuat rasa bangga sebagai orang Papua sekaligus memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif. Generasi muda Papua perlu tumbuh dengan pemahaman bahwa mereka adalah bagian penting dari Indonesia—bukan hanya secara administratif, tetapi secara kultural dan emosional.

Di sisi lain, negara juga perlu membuka ruang-ruang partisipasi politik yang lebih besar bagi masyarakat Papua. Kebijakan otonomi khusus, misalnya, harus benar-benar dievaluasi pelaksanaannya agar tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi menjadi wadah nyata bagi masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Keterlibatan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil negara benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Dialog yang setara antara negara dan masyarakat Papua juga merupakan langkah krusial. Selama ini, suara-suara dari Papua kerap dipinggirkan atau bahkan dibungkam. Ruang-ruang kritik sering kali dipersempit atas nama stabilitas. Namun, stabilitas yang dibangun di atas represi bukanlah stabilitas yang tahan lama. Justru dialog terbuka dan tulus akan menjadi fondasi kuat bagi rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang. Negara harus belajar untuk tidak alergi terhadap kritik, karena dari situlah kita bisa bertumbuh sebagai bangsa.

Dalam kesimpulan yang lebih luas, konflik Papua adalah pengingat bagi kita semua bahwa proyek kebangsaan Indonesia masih jauh dari selesai. Ia adalah proyek yang menuntut komitmen, keberanian, dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan masa lalu serta memperbaikinya secara bersama. Indonesia yang adil, damai, dan kuat hanya bisa terwujud jika seluruh wilayah—termasuk Papua—merasa bahwa mereka adalah pemilik sah dari rumah besar bernama Indonesia ini.

Ketahanan nasional tidak bisa lagi dipahami sebagai konsep elitis yang hanya relevan di ruang-ruang pemerintahan atau militer. Ia harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat—terasa dalam sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, hingga jalan-jalan kecil di pelosok Papua. Ketahanan nasional yang sejati adalah ketika seorang

anak Papua bisa bermimpi setinggi anak-anak di Jakarta, Surabaya, atau Bandung, dan tahu bahwa mimpinya dihargai dan bisa terwujud di negeri ini.

Untuk itu, kita memerlukan transformasi paradigma dalam membangun bangsa. Kita butuh lebih banyak mendengar daripada menggurui, lebih banyak merangkul daripada menindas, dan lebih banyak bekerja sama daripada mencurigai. Papua tidak akan menjadi kuat dengan pendekatan militeristik semata, melainkan dengan pendekatan kemanusiaan yang tulus.

Papua bukan ancaman. Papua adalah harapan. Ia adalah bagian dari mozaik kebangsaan yang memperkaya Indonesia. Ketika Papua bahagia, Indonesia menjadi lebih kuat. Ketika Papua sejahtera, Indonesia lebih kokoh. Dan ketika Papua merasa dicintai, maka Indonesia akan benar-benar utuh—bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara batiniah.

Maka dari itu, mari kita akhiri era ketidakpercayaan dan buka lembaran baru dalam sejarah bangsa ini. Sebuah lembaran yang ditulis bersama, dengan tinta pengakuan, pena keadilan, dan kertas kasih sayang. Karena sejatinya, ketahanan nasional tidak dibangun oleh tembok dan senjata, melainkan oleh jiwa-jiwa yang saling percaya dan saling menguatkan.

REFERENCES - DAFTAR PUSTAKA

Kusumawardhani, A. D. (2020). Strategi Penyelesaian Konflik di Papua: Pendekatan Human Security. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 185–198. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.855>

Runtuboi, D. A., & Pangaribuan, R. E. (2021). Disparitas Sosial Ekonomi dalam Konflik Papua. *Jurnal Sosial Politik Papua*, 3(1), 22–34.

Wibowo, M., & Lestari, S. (2023). Pendidikan Bela Negara sebagai Upaya Menanamkan Nasionalisme di Papua. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(1), 45–59.

Yuliani, E., & Sutrisno, B. (2022). Ketahanan Nasional dalam Perspektif Lokal: Studi Kasus Papua. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 78–92. <https://doi.org/10.22146/jkn.70568>

Zulkarnaen, M. (2024). Nasionalisme dan Identitas Budaya Lokal dalam Pembangunan Daerah Terpencil. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 12(1), 14–29.